



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol No. 29

Jakarta

Telp. 021 31937223

E-mail: persuratan@kpu.go.id

NOTA DINAS

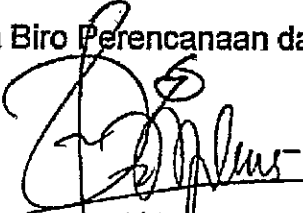
Kepada : Yth. Kepala Biro Perundang-Undangan
Dari : Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Tembusan : 1. Yth. Bapak Sekretaris Jenderal KPU
2. Yth. Bapak Plt. Deputi Bidang Administrasi KPU
3. Yth. Bapak Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU
4. Yth. Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Nomor : 1556/PR.08-ND/01/2022
Tanggal : 23 Desember 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pengunggahan Surat Ketua KPU Nomor: 1308/PR.08-SD/01/2022 ke JDIH KPU.

Menyusuli Surat KPU Nomor: 1308/PR.08-SD/01/2022 Perihal Tindak Lanjut Kerja Sama antara KPU dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan antara KPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh mengenai tindak lanjut kerja sama dimaksud sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU sebagaimana terlampir.

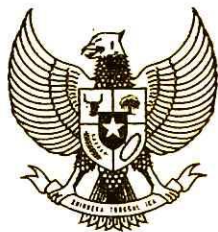
Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan permohonan pengunggahan surat sebagaimana dimaksud ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,



M. Krisdiono



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1308/PR.08-SD/01/2022 Jakarta, 8 Desember 2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Tindak Lanjut Kerja Sama antara
KPU dengan Kejaksaan Republik
Indonesia dan antara KPU
dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi Seluruh Indonesia
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
di-
Tempat

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, perlu koordinasi dan dukungan dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk Kerja Sama.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menyinergikan tugas dan fungsi KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU telah membuat Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Republik Indonesia dengan Nomor 80/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor 14 Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:
 - a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
 - b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
 - d. Pengamanan Pembangunan Strategis;
 - e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia; dan
 - f. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
2. Bahwa KPU telah membuat Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - b. Bantuan pengamanan;
 - c. Penegakan hukum;
 - d. Perumusan peraturan teknis;
 - e. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
 - f. Pemanfaatan sarana dan prasarana.
3. Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada angka 2, sedang dalam proses koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait proses pelaksanaan penandatanganan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut;

1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat menindaklanjuti kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri setempat serta dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat berdasarkan Nota Kesepahaman antara KPU dengan Kejaksaan Agung serta antara KPU dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
2. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota agar melakukan koordinasi dan menyampaikan ketentuan kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri setempat serta dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
3. KPU Provinsi agar melaporkan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama dimaksud secara tertulis kepada KPU; dan
4. KPU Kabupaten/Kota melaporkan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama dimaksud secara tertulis kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Informasi lebih lanjut dan koordinasi teknis dapat menghubungi Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen KPU, Sdr. Feri (Hp: 081219764660), Sdri. Kiki (Hp: 081259592992), atau Sdr. Ikhsan (Hp: 085155368223).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum



Hasyim Asy'ari



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DENGAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 80.PR.07-NK/01/2022

NOMOR : 14 TAHUN 2022

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (07-12-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HASYIM ASY'ARI** : Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pengamanan Pembangunan Strategis;
- e. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar

kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi
Email : inter-org.division@kpu.go.id
Alamat : Jalan Teuku Cik Ditiro No. 37, Menteng,
Jakarta Pusat 10310

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar
Negeri
Email : kahlu@kejaksaan.go.id
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 11
SOSIALISASI

(1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/wilayah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

